BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/186/BMD TAHUN 2026

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO PEROLEHAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Perolehan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-Undang...2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjulan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

12.Peraturan Pemerintah...3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

22. Peraturan Daerah...4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedus Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO PEROLEHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Perolehan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 19 Mei 2026



BUPATI BUNGO,

${ttd}

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/186/BMD TAHUN 2026
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO
PEROLEHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO PEROLEHAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG							Tahun Perolehan	Bahan	Kondisi (B/KB/RB)	Asal Usul	Nilai Perolehan Tahun 2025	Alamat	Ket.
No. Urut	Kode Barang	Register	Nama/ Jenis Barang	Luas	Merk	Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin	No. Rangka	No. Polisi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.3.2.05.02.01.030	000051	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
2	1.3.2.05.02.01.030	000052	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
3	1.3.2.05.02.01.030	000053	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
4	1.3.2.05.02.01.030	000054	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
5	1.3.2.05.02.01.030	000055	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
6	1.3.2.05.02.01.030	000056	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
7	1.3.2.05.02.01.030	000057	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
8	1.3.2.05.02.01.030	000058	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
9	1.3.2.05.02.01.030	000059	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
10	1.3.2.05.02.01.030	000060	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
11	1.3.2.05.02.01.030	000061	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12	1.3.2.05.02.01.03 0	000062	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
13	1.3.2.05.02.01.03 0	000063	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
14	1.3.2.05.02.01.03 0	000064	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
15	1.3.2.05.02.01.03 0	000065	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
16	1.3.2.05.02.01.03 0	000066	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
17	1.3.2.05.02.01.03 0	000067	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
18	1.3.2.05.02.01.03 0	000068	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
19	1.3.2.05.02.01.03 0	000069	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
20	1.3.2.05.02.01.03 0	000070	Meja Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	2.841.600,00		
21	1.3.2.05.02.01.03 0	000001	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
22	1.3.2.05.02.01.03 0	000002	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
23	1.3.2.05.02.01.03 0	000003	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
24	1.3.2.05.02.01.03 0	000004	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
25	1.3.2.05.02.01.03 0	000005	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
26	1.3.2.05.02.01.03 0	000006	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
27	1.3.2.05.02.01.03 0	000007	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
28	1.3.2.05.02.01.03 0	000008	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
29	1.3.2.05.02.01.03 0	000009	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
30	1.3.2.05.02.01.03 0	000010	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
31	1.3.2.05.02.01.03 0	000011	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
32	1.3.2.05.02.01.03 0	000012	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

33	1.3.2.05.02.01.03 0	000013	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
34	1.3.2.05.02.01.03 0	000014	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
35	1.3.2.05.02.01.03 0	000015	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
36	1.3.2.05.02.01.03 0	000016	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
37	1.3.2.05.02.01.03 0	000017	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
38	1.3.2.05.02.01.03 0	000018	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
39	1.3.2.05.02.01.03 0	000019	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
40	1.3.2.05.02.01.03 0	000020	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
41	1.3.2.05.02.01.03 0	000021	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
42	1.3.2.05.02.01.03 0	000022	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
43	1.3.2.05.02.01.03 0	000023	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
44	1.3.2.05.02.01.03 0	000024	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
45	1.3.2.05.02.01.03 0	000025	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
46	1.3.2.05.02.01.03 0	000026	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
47	1.3.2.05.02.01.03 0	000027	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
48	1.3.2.05.02.01.03 0	000028	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
49	1.3.2.05.02.01.03 0	000029	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
50	1.3.2.05.02.01.03 0	000030	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
51	1.3.2.05.02.01.03 0	000031	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
52	1.3.2.05.02.01.03 0	000032	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
53	1.3.2.05.02.01.03 0	000033	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

54	1.3.2.05.02.01.03 0	000034	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
55	1.3.2.05.02.01.03 0	000035	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
56	1.3.2.05.02.01.03 0	000036	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
57	1.3.2.05.02.01.03 0	000037	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
58	1.3.2.05.02.01.03 0	000038	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
59	1.3.2.05.02.01.03 0	000039	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
60	1.3.2.05.02.01.03 0	000040	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
61	1.3.2.05.02.01.03 0	000041	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
62	1.3.2.05.02.01.03 0	000042	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
63	1.3.2.05.02.01.03 0	000043	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
64	1.3.2.05.02.01.03 0	000044	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
65	1.3.2.05.02.01.03 0	000045	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
66	1.3.2.05.02.01.03 0	000046	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
67	1.3.2.05.02.01.03 0	000047	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
68	1.3.2.05.02.01.03 0	000048	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
69	1.3.2.05.02.01.03 0	000049	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
70	1.3.2.05.02.01.03 0	000050	Kursi Rapat							2025	Campuran	Baik	Pembelian	839.000,00		
71	1.3.2.05.02.04.00 4	000007	A.C Split		Sharp					2025	Campuran	Baik	Pembelian	6.499.000,00		
72	1.3.2.05.02.04.00 4	000008	A.C Split		Sharp					2025	Campuran	Baik	Pembelian	6.499.000,00		
73	1.3.2.05.02.04.00 4	000009	A.C Split		Sharp					2025	Campuran	Baik	Pembelian	6.499.000,00		
74	1.3.2.05.02.04.00 4	000010	A.C Split		Sharp					2025	Campuran	Baik	Pembelian	6.499.000,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

75	1.3.2.10.01.02.002	000002	LAPTOP		Acer					2025	Campuran	Baik	Pembelian	12.537.999,50		
76	1.3.2.10.01.02.002	000003	LAPTOP		Acer					2025	Campuran	Baik	Pembelian	12.537.999,50		
77	1.3.2.05.02.04.004	000001	Tab S10 FE		Samsung					2025	Campuran	Baik	Pembelian	12.065.700,00		
78	1.3.2.05.02.04.004	000001	Tab S10 FE		Samsung					2025	Campuran	Baik	Pembelian	12.065.700,00		
79	1.3.2.05.02.04.004	000001	Tab S10 FE		Samsung					2025	Campuran	Baik	Pembelian	12.065.700,00		
80	1.3.2.05.02.04.004	000001	Tab S10 FE		Samsung					2025	Campuran	Baik	Pembelian	9.150.000,00		
JUMLAH														**195.201.099,00**		

PATI BUNGO,

${ttd}

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).